

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Anggara, Sahya, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Asyiah, Nur, *Hukum Administrasi Negara*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2018.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1994.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Djarmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Ghufron, Ahmad dan Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi negara (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Hartini, Sri, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hawke, Neil, Neil Parpworth, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Nusamedia, Bandung, 2017.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Adminisitrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

- Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Admnistrasi Negara*, Ghalia, Bogor, 2004.
- Logemann, J.H.A., *Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*, Universitiet Press, Leiden, 1948.
- Ma'ruf, Jasman J., *Assesment Center Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum Kepegawaian*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- _____, *Seri Hukum Administrasi Negara Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Muslimin, Amrah, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian, Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Saputra, M. Nata, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016.
- Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Rony Habitiho, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- _____ dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Syaukani, Arfan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Triatmodjo, Sudiby, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, 1986.

_____, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Negeri Pajajaran, Bandung, 1960.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5997).

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037).

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402).

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477).

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat 15/228/2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat 19/298/2016).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 835).

Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 56).

JURNAL ILMIAH

Abdullah, Dudung, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Positium*, Vol. 1 No. 1, 2016.

Bardhan, Pranab, The Chinese Governance System: Its Strengths and Weaknesses in a Comparative Development Perspective, *China Economic Review*, Vol. 61, 2020.

Barus, Sovia Ivana, Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2022.

Damayanti, Della, Mahendro Sumardjo, Alfatih S. Manggabarani, Analisis Pengawasan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Di Instansi Pemerintah Oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2022.

Dwiputrianti, Septiana, Challenges with Implementation of the Merit System in the Open Recruitment of Government High Positions: The Case in Indonesia, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 191, 2018.

Gumay, Muhammad Fariz, Tedi Sudrajat, dan Sri Hartini, Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Yang Berimplikasi Penataan Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Soedirman Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Hadi, Syofyan dan Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Hartini, Sri, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2009.

- Hayat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Kebijakan Manajemen dan PNS*, Vol. 8 No.1, 2014
- Indika, Alkindi, Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Sistem Merit Pada Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, *Jurist Diction*, Vol. 2 No. 5, 2019.
- Jaya, Alwi dan Elvi Susanti, Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 1, 2022,
- Lismanto, L. dan Yos Johan Utama, Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020.
- Mius, A., Ermaya Suradinata, Muh. Ilham, dan H. M. Aries Djaenuri, Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Mokodongan, Dadang, Michael Mantiri, dan Neni Kumayas, Promosi Jabatan dalam Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota Kotamobagu, *Eksekutif*, Vol. 3 No. 3, 2019.
- Mubarak, Ridho dan Wessy Trisna, Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2021
- Mustika, Cindyva Thalia, Suprpto, Achmad Faishal, Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *Banua Law Review*, Vol 3 No. 1, 2021
- Nuradhawati, Rira, Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Prasetio, Teguh dan Maharani Nurdin, Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Prayitno, Suko, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Rakhmawanto, Ajib, Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Said, Abdul Rauf Alauddin, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, 2015
- Sandi, Arista Jehan, Tedi Sudrajat, dan Weda Kupita, Analisis Yuridis Freies Ermessen Sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Pejabat Pembina

Kepegawaian Tentang Demosi (Studi Putusan Nomor: 088/G/2014/PTUN.SMG), *Soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Sarbini, Eksistensi Perjanjian Proporsionalitas Dalam Hukum Perjanjian: Manifestasi Dan Dinamika, *Al-Qisthas*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Setyaningsih, Kris, Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat, *El- Idare*, Vol. 3 No. 1, 2017.

Sudarwanto, Al Sentot, Revitalisasi Partisipasi Publik Pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Dalam Sistem Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2, 2022

Sudrajat, Tedi, Eksistensi Kebijakan Pengisian Jabatan Struktural Dalam Kerangka Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Merit, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 8 No. 1, 2014.

Sugiarto, Laga, Pemaknaan Surat Keputusan Yang Bersifat Deklaratif Dan Konstitutif (Implikasi Sk Menkumham Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya), *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2017.

Suharman, Edi, Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Ius*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Widijowati Dijan, Determining Criminal Actions in Corruption: The Characteristics of Freies Ermessen Principles, *The SoutheastAsian Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2016.

Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2015.

LAPORAN PENELITIAN, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Amalia, Rizki, Peranan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Dalam Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi di Kota Bekasi), *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2016.

Aminingrum, Kurnia Putri, Penilaian Kinerja Secara Elektronik Dan Implikasinya Terhadap Evaluasi Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2018.

Dewi, Karina, Pengisian Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2017.

Dewi, Kartika, Analisis Normatif Kewenangan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2017.

Dewi, Nathasya Larassati, Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara Oleh Presiden Dalam Pelanggaran Prinsip Sistem Merit Yang Dilakukan Oleh

- Pejabat Pembina Kepegawaian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2021.
- Ekaputra, Harun Abdul Aziz, Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Tangerang), *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2018.
- Lestari, Livia Intan Dwi, Pertanggungjawaban Pejabat Pembina Kepegawaian Terhadap Kesalahan Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2022.
- Pradana, Erin, Peran Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Penegakkan Hukuman Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas, *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2018.
- Priyatmoko, Azhar, Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundang Undangan Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021.
- Putri, Dinda Silviana, Urgensi Pemberian Kewenangan Penyadapan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, 2017.
- Salami, Dien Ilaya Nonita, Prosedur Operasional Baku Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Administrasi dan Implikasinya Terhadap Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga, *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2018.
- Sari, Erine Tri Yulia, Keputusan Gubernur Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 1/G/2017/PTUN.YK), *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, 2021.
- Sembiring, Firdanta, Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Bpk Dan Bpkp Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2013.
- Syah, Abdul Rauf Alauddin, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, 2015.
- Torang, Lawrence Averino Magistrate, Tinjauan Yuridis Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2022.

MEDIA ONLINE

Alifia, Nabila Nurrisqi, Sistem Rumah Tangga Daerah Indonesia, https://www.academia.edu/28718880/SISTEM_RUMAH_TANGGA_D_AERAH_INDONESIA, 16 Desember 2022.

Azzam, Muhammad, 03 September 2022, Parah, Bupati Karawang Biarkan 16 Jabatan Kepala OPD Kosong, Ridwan Kamil Harus Menegur, <https://wartakota.tribunnews.com/2022/09/03/parah-bupati-karawang-biarkan-16-jabatan-kepala-opd-kosong-ridwan-kamil-harus-menegur>, 02 Oktober 2022.

Budianto, Valerie Augustine, 26 April 2022, 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>, 03 Februari 2023.

KBBI Daring, jabatan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jabatan>, 13 Desember 2022.

MAKALAH

Asshiddiqie, Jimly, Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik, Makalah pada “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2: Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara,” diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Padang, 2015.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Eki Hendradika (Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Selasa, 24 Januari 2023, Pukul 11.00, di Kantor BKPSDM Karawang.

Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan Kusdiawan (Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang), Jumat 20 Januari 2023, Pukul 14.00, di Kantor BKPSDM Karawang.

Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan Kusdiawan (Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang), Senin 30 Januari 2023, Pukul 13.00, di Kantor BKPSDM Karawang.

Hasil Wawancara dengan Ibu Pungki Hermayanti, Selasa 24 Januari 2023, Pukul 11.30, di Kantor BKPSDM Karawang.